

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

TANDA PENGESAHAN

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

RINGKASAN

SUMMARY

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

i

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR GAMBAR

vi

DAFTAR LAMPIRAN

vii

BAB I PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Perumusan Masalah

9

C. Tujuan Penelitian

10

D. Kontribusi Penelitian

10

E. Sistematika Pembahasan

11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

14

A. Pemerintahan Daerah

14

1. Desentralisasi

14

2. Desentralisasi Fiskal

17

3. Otonomi Daerah

18

a. Pengertian dan Konsep Otonomi Daerah

18

b. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

20

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

22

1. Pajak Daerah

23

a. Pengertian Pajak Daerah

23

b. Jenis dan Tarif Pajak

25

2. Retribusi Daerah

26

a. Pengertian Retribusi Daerah

26

b. Jenis Retribusi Daerah	27
c. Jenis Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	30
d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah	30
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32
C. Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah	33
D. Konsep Efektivitas	34
1. Pengertian Efektivitas	34
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	36
E. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37
1. Pengertian BPHTB	37
2. Sejarah Berlakunya BPHTB	38
3. Obyek dan Subjek BPHTB	40
4. Pemungutan Pajak BPHTB	41
5. Pejabat Yang Berwenang Dalam Pemenuhan Ketentuan BPHTB	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Fokus Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Instrumen Penelitian	51
G. Analisis Data	51
a. Analisis Sebelum di Lapangan	53
b. Analisis Selama di Lapangan Model Miles dan Huberman	53
1. Reduksi Data	53
2. Penyajian Data	54
3. Kesimpulan/Verifikasi	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Penyajian Data Umum	56
1. Gambaran Umum Kabupaten Kediri	56
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri	69
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	75
1. Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	75
a. Pemungutan BPHTB Oleh Pemerintah Pusat	75
b. Pemungutan BPHTB Oleh Pemerintah Daerah	76
2. Efektivitas Pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	78
a. Waktu dan Biaya Selama Pemungutan BPHTB	82

b.	Sistem Pemungutan BPHTB	83
c.	Aktor Yang Berperan Dalam Pemungutan BPHTB	85
d.	Monitoring dan Pengawasan Pemungutan BPHTB	87
e.	Hasil Pemungutan BPHTB	88
f.	Kontribusi BPHTB	92
3.	Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Setelah Menjadi Pajak Daerah	94
a.	Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Setelah Menjadi Pajak Daerah	94
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.1 Tahun 2011	94
2.	Pengawasan Yang Efektif	95
3.	Peran Serta Wajib Pajak	96
b.	Faktor Penghambat Pemungutan BPHTB Setelah Menjadi Pajak Daerah	96
1.	Kurangnya Kesadaran Masyarakat Selaku Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak BPHTB	96
2.	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendapatan	97
C.	Analisis Data	99
1.	Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	99
a.	Pemungutan BPHTB Oleh Pemerintah Pusat	99
b.	Pemungutan BPHTB Oleh Pemerintah Daerah	101
2.	Efektivitas Pemungutan BPHTB	103
a.	Waktu dan biaya selama pemungutan BPHTB	105
b.	Sistem pemungutan BPHTB	106
c.	Aktor yang berperan dalam pemungutan BPHTB	108
d.	Monitoring dan Pengawasan Pemungutan BPHTB	109
e.	Hasil Pemungutan BPHTB	111
f.	Kontribusi BPHTB	112
3.	Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Setelah Menjadi Pajak Daerah	113
a.	Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemungutan BPHTB Setelah Menjadi Pajak Daerah	113
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.1 Tahun 2011	114
2.	Pengawasan yang Efektif	114
3.	Peran Serta Wajib Pajak	115
b.	Faktor Penghambat Pengelolaan BPHTB Setelah Menjadi Pajak Daerah	116

1. Kurangnya Kesadaran Sebagian Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak BPHTB	116
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendapatan	117

BAB V PENUTUP **118**

A. Kesimpulan	118
---------------------	-----

B. Saran	123
----------------	-----

